TAJUK RENCANA

Perketat Penegakan Protokol Kesehatan

KASUS positif Covid-19 di DIY terus bertambah, bahkan mulai muncul klaster baru, seperti klaster pedagang kakilima di Malioboro. Meski demikian, pemerintah daerah tidak serta merta menutup seluruh kawasan Malioboro, melainkan hanya menutup sementara lapak di sekitar tempat kejadian perkara. Selanjutnya, seluruh kawasan disemprot dengan disinfektan.

Bila kita cermati, melonjaknya kasus positif Covid-19 tidak menyurutkan animo wisatawan berkunjung ke destinasi wisata di DIY. Bahkan, berdasar catatan aplikasi visiting jogja dalam setiap akhir pekan, jumlah wisatawan, terutama wisatawan nusantara (winus) bisa mencapai 30.000 hingga 40.000, angka yang sangat signifikan di tengah pandemi Covid-19. Nampaknya, mereka tidak terlalu khawatir dengan melonjaknya angka orang yang terpapar virus Korona di DIY.

Padahal, hampir semua destinasi wisata di DIY masih dalam tahap uji coba, yang artinya belum buka sepenuhnya, namun sudah dijubeli pengunjung. Agaknya, masyarakat sudah tak sabar lagi untuk menikmati suasana normal dengan berkunjung ke tempat-tempat wisata di DIY yang notabene punya daya tarik tersendiri.

Berkaitan itu, Pemda DIY menyatakan tidak akan kendur menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. Hemat kita, memang sudah seharusnya demikian. Namun, bagaimana kenyataan di lapangan ? Dengan mudah kita bisa menyaksikan masih banyak pengunjung yang tidak patuh protokol kesehatan. Pelanggaran paling gampang ditemui adalah pemakaian masker yang tidak benar. Mereka mengenakan masker, namun pemakaiannya tidak benar, yakni tidak menutup hidung atau mulut, atau malah keduanya.

Saat di depan petugas tentu mereka tertib memakai masker secara benar, namun setelah itu, masker tak lebih dari sekadar aksesoris. Pelanggaran semacam ini jamak ditemui di tempat-tempat keramaian seperti tempat wisata, pasar dan sebagainya. Untuk itulah petugas penegak aturan tak cukup hanya berjaga di pintu masuk, melainkan juga harus masuk dan berbaur dengan pengunjung. Dari situlah pelanggaran akan terpantau dengan jelas.

Pengetatan protokol kesehatan juga harus diterapkan kepada petugas di lapangan. Mereka adalah garda terdepan, karena memberi contoh kepada masyarakat. Artinya untuk mendisiplinkan orang lain, harus dimulai dengan mendisiplinkan diri sendiri. Bahwa kemudian akan ada sanksi bagi pelanggar, seiring terbitnya Pergub DIY No 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, tentu hanya sebagai pelengkap saja. Sebab, inti dari penegakan protokol adalah kedisiplinan.

Bila masyarakat abai dan tidak disiplin, maka potensi penyebaran Covid-19 akan terus terjadi. Kedisiplinan diri sendiri ini jauh lebih penting dari segala aturan yang ada. Apalagi, kini mulai muncul klaster keluarga yang dari hari ke hari makin mengkhawatirkan. Kiranya harus ditanamkan kesadaran masyarakat bahwa kalau memang sayang keluarga, hendaknya patuh pada protokol kesehatan, yaitu selalu rajin mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

Untuk hal yang disebut kedua dan ketiga ini rasanya memang sulit diterapkan di keluarga. Langkah minimal yang biasa dilakukan selain mencuci tangan adalah mandi dan berganti baju sebelum berkumpul dengan keluarga. Itu adalah langkah minimal untuk menjaga keluarga. ❑

Hilangnya Konsep 'Meguru' dalam Pendidikan

Ki Sugeng Subagya

JAUH sebelum Proklamasi Kemerdekaan, konsep pendidikan nasional sangat jelas. Pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan untuk tumbuh dan berkembangnya jiwa merdeka. Setelah Proklamasi, konsep pendidikan nasional malah tidak jelas. Pendidikan nasional terjajah oleh penyeragaman pendidikan global.

Bagi Bangsa Indonesia, pendidikan yang memerdekakan adalah kearifan lokal yang digali dari lubuk terdalam kekayaan Nusantara. Pendidikan yang telah dipraktikkan nenek moyang Bangsa Indonesia sejak berabad-abad lampau. Sistem pendidikan 'pertapan' dan 'paguron' adalah praktik pendidikan dengan cara *meguru*. Dalam karya Sastra Jawa lisan masa lampau sering disebut *golek banyu bening*.

Penyeragaman global melalui standar internasional pendidikan telah menenggelamkan *meguru*. Serat Wulangreh karya Pakubowono IV (1788ñ1820) menggambarkan fenomena ini. Pada *pupuh* Dhandhanggula bait ke-8 disebutkan, *"... ingkang lumrah ing mangsa puniki, mapan guru ingkang golek sabat, tuhu kuwalik karepe. Kang wus lumrah karuhun, jaman kuna mapan si murid, ingkang pada ngupaya, kudu angguguru, ing mengko iki ta nora, Kyai Guru narutuk ngupaya murid, dadiya kanthinira"*. Inti makna tembang ini dalam terjemahan bebas, di zaman sekarang malah guru yang mencari murid. Lazimnya yang terjadi pada zaman dahulu, muridlah yang mencari guru.

Terjajah

Konteks murid mencari guru (*meguru, nyantri*, dan sebagainya) dapat dimaknai bahwa yang membutuhkan perubahan sikap untuk memiliki kecakapan dan keterampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan adalah murid. Jika pada masa lampau, guru sangat dihormati dan dipatuhi perintahnya, itulah konsekuensi logis atas murid yang membutuhkan guru.

Pasca-proklamasi pendidikan *meguru* semakin terjajah. Sistem pendidikan *pertapan* dan *paguron* yang telah menunjukkan jati dirinya sebagai pendidikan merdeka mulai menghilang dan tidak berbekas. Jikapun masih ada, sifat hakikatnya mulai luntur bersama dengan musnahnya bentuk, isi, dan iramanya.

Transformasi Ujian Nasional (UN) ke Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK) yang hingga saat ini belum terlihat detilnya, merupakan contoh kasus keterjajahan pendidikan nasional. Standar PISA (*Programme for International Student Assessment*) yang digadang-gadang menjadi acuan penjaminan mutu pendidikan nasional adalah bentuk baru ketidakmerdekaan pendidikan kita.

KR-JOKO SANTOSO

Meyakini secara mutlak pemeringkatan kinerja pendidikan suatu negara berdasar skor standar internasional tertentu merupakan watak inlander, dimana pribumi selalu dijadikan kelas paling bawah. Skor standar internasional dipastikan tidak dapat mengukur ketercapaian kinerja secara utuh dan menyeluruh terhadap tujuan pendidikan nasional. Yang secara eksplisit dirumuskan dalam UU No. 23/2003, sebagai "... untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab ..."

Skor Standar

Potensi anak didik itu beragam baik tingkatan maupun macamnya. Apakah skor standar internasional mampu mendeteksi keberagaman itu? Bukankah standar internasional malah hendak menyeragamkan potensi anak didik? Jika demikian halnya apakah bukan berarti hal ini akan menyempitkan tujuan pendidikan nasional sekadar meningkatkan skor standar internasional?

Praktik *meguru* tidak lagi penting di dalam skor standar internasional. Untuk mencapai standar internasional (yang sesungguhnya hanya fatamorgana), hanyalah belajar. Dalih tuntutan penyeragaman global dalam konteks standar internasional memang tidak seluruhnya salah. Namun ketika penyeragaman global itu kemudian meninggalkan sama sekali kecakapan-kecakapan lokal yang pernah ada dan bernilai sangat tinggi, itulah salahnya. Kecakapan lokal tidak kalah penting daripada kecakapan global.

Membangun pendidikan nasional adalah mengangkat derajat bangsa dengan peradaban bangsa sendiri sehingga melampaui kinerja bangsa-bangsa lain. Bukan sekadar mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Dan kemudian sebatas merujuk standar internasional. ❑

*) ***Ki Sugeng Subagya**, Pamong Tamansiswa, Praktisi Pendidikan dan Kebudayaan.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat.* Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email *pikiranpembaca@gmail.com.* Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Hari Aksara Internasional

MENULIS, apapun bentuk atau genre yang kita pilih mempunyai keunikan tersendiri. Siapapun Anda yang saat ini sedang atau telah mengikhlaskan diri untuk menulis, atau setidaknya mulai menggemari kegiatan menulis, tentu memiliki latar belakang ataupun tujuan yang beraneka ragam. Kecintaan kita dengan dunia tulis menulis tidak akan jauh dengan aksara. Aksara atau sering pula disebut huruf sudah kita kenal sejak kelas 1 SD atau bahkan sejak TK sudah ada yang mengenalkan aksara. Sejak saat itu pula kita akrab dengan aksara.

Tahun 1990-an Indonesia menggalakkan Gerakan Nasional B3B (Bebas 3 Buta). Gerakan tersebut fokus pada tiga hal yaitu berantas buta aksara, buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar. Ketiga hal tersebut pada hakikatnya memang menjadi kebutuhan utama untuk komunikasi bagi setiap manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Mengenal aksara menjadi pintu untuk dapat membaca dan menulis. Cakap membaca menjadi modal berharga dalam menguasai bahasa (Indonesia), menguasai kosakata akan menjadi pintu masuknya berbagai ilmu dan pengetahuan.

PBB menetapkan 8 September sebagai Hari Aksara atau Literasi International merupakan langkah yang sangat strategis. PBB menetapkan Hari Aksara/Literasi pada tahun 1966. Penetapan Hari Aksara/-Literasi tentunya bukan serta merta namun melalui kajian dan penelitian mendalam. Sejak saat itu sampai saat ini 8 September selalu diperingati sebagai Hari Aksara Internasional oleh seluruh negara di dunia.

Memperingati Hari Aksara/Literasi pada dasarnya membuka kembali memori dan aktualisasi pentingnya aksara/literasi pada era milenial saat ini. Era di mana cabang literasi berkembang begitu pesat. Hampir tiap menit kita dibanjiri aneka informasi dan pengetahuan dalam aneka ragam bidang. Kemampuan literasi tidak sebatas kita membaca atau mengetahui informasi, tetapi juga menuntut kita cerdas memilih dan memilah setiap informasi yang kita terima. Kejelian dan kebijakan kita sangat penting agar kita bisa menjadi masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak mudah terpengaruh terhadap sesuatu yang kita terima.

Langkah pemerintah saat ini dengan menggencarkan Gerakan Literasi Nasional yang diejawantahkan dalam tiga ranah (Gerakan Literasi Keluarga, Gerakan Literasi Masyarakat dan Gerakan Literasi Sekolah) mempunyai ruh yang sama dengan Gerakan B3B pada 30 tahun lalu, sehingga sebagai warga negara sudah sepantasnya kita ikut ambil bagian di dalamnya sesuai peran dan fungsi kita. Menggelorakan membaca dan menulis bisa jadi merupakan langkah kecil kita untuk berpartisipasi. Kemampuan menulis kita akan terasah bila kita mau membaca dan tergerak hati kita untuk mulai menulis, meskipun tulisan sederhana.

Momen Hari Aksara tahun ini setidaknya menjadi pelecut dalam berkarya. Berkarya untuk saling berbagi informasi dan menggemakan gerakan literasi untuk negeri. Karena sesuatu yang remeh bagi kita bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Mari terus berbagi karya. Selamat Hari Aksara.

***Giyoto SPd MPd,** Guru SD Lempuyangwangi, Yogya.*

Kuasa Data Menuju Desa Mandiri Budaya

Ahmad Mizdad Hudani

DALAM Sapa Aruh Sewindu UUK DIY, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengeluarkan refleksi berjudul 'Mengolah Kritik dan Menata Desa sebagai Basis Keistimewaan DIY'. Pada kesempatan tersebut Sri Sultan HB X menyampaikan Keistimewaan DIY harus mendorong pendirian Desa Mandiri Budaya melalui siasat-siasat kebudayaan.

Menanggapi Pidato Sri Sultan HB X, Ryan Sugiarto, di Harian KR (4/9) menguraikan makna kebudayaan sebagai segala sistem hidup dan penghidupan warga, tata nilai, dan pranata-pranata sosial masyarakat. Menurutnya untuk mewujudkan desa mandiri budaya diperlukan kemandirian desa. Yang dapat dicapai melalui reformasi politik dan pemerintahan, penguatan ekonomi desa, serta pengembangan data desa.

Dari tiga pilar penyokong kemandirian desa tersebut, data menjadi salah satu pilar selain politik dan ekonomi. Untuk mempercepat pembangunan desa demi tercapainya kemandirian desa, data memiliki peran penting. Pengelolaan data yang baik akan menghasilkan kualitas kebijakan yang baik.

Tradisi Lisan

Ilmu titen dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai salah satu contoh dari praktik pengelolaan data. Di dalam *ilmu titen* terdapat proses *niteni*. Yaitu proses di mana masyarakat mengambil data dari fenomena alam maupun fenomena sosial. Data tersebut kemudian diekstrak menjadi pengetahuan, nilai, hingga mitos yang berkembang di masyarakat. Hasil dari ekstraksi data tersebut kemudian disebarkan melalui tradisi lisan.

Ilmu titen dan tradisi lisan tersebut merupakan cara khas masyarakat desa zaman dahulu dalam mengelola data. *Big data* alam maupun realitas sosial disimpan di ingatan warga. Kecerdasan warga digunakan untuk memroses data, dan budaya sebagai sistem yang menjalankannya. Proses pengelolaan data khas desa inilah yang kemudian turut serta membentuk kualitas hidup masyarakat desa.

Di zaman digital pengelolaan data terhenti apabila platform atau aplikasinya rusak. Maka pengelolaan data khas desa juga berhenti ketika budayanya rusak. Saat ini budaya sebagai teknologi pengelolaan data khas desa mulai rusak. Salah satu parameternya adalah mulai langkanya 'lumbung pengetahuan' desa. Hilangnya 'lumbung pengetahuan' desa ini disebabkan berbagai macam hal. Salah satunya karena pendidikan dimaknai sebagai milik sekolah saja.

Hal ini berdampak pada proses transfer pengetahuan yang terganggu. Selain itu, kurikulum sekolah yang tidak memberi cukup ruang untuk pengetahuan lokal mempercepat hilangnya cara khas desa mengelola data. Jika fenomena ini terus terjadi, maka masyarakat desa akan kehilangan kemampuan mengelola datanya sendiri.

Overload Data

Terus berkembangnya teknologi digital ditambah semakin banyaknya pengguna teknologi digital, menyebabkan terjadinya *overload* data. Pada tahun 2018 tercatat 2.5 kuintiliun data digital diproduksi setiap hari. Di masa pandemi Covid-19 ini penggunaan teknologi digital naik tajam, tentunya produksi data digital juga akan naik tajam.

Begitu banyak jumlah data yang diproduksi, desa hanya mengelola bagian sangat kecil dari data tersebut. Data mengalir ke kantong-kantong server perusahaan big tech seperti google, facebook, amazon, dan lain-lain. Data desa dikuasai perusahaan-perusahaan tersebut, warga desa yang sejatinya merupakan pemilik data kemudian kehilangan kuasa atas datanya. Yang berbahaya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menentukan kualitas hidup warga desa dengan memanfaatkan data yang dikuasai.

Mengingat pentingnya data, maka tidak berlebihan apabila data menjadi salah satu pilar kemandirian desa. Sulit membayangkan Desa Mandiri Budaya ketika desa sendiri kehilangan kemampuan menentukan kualitas hidup warga desanya.

Desa harus merebut kembali kedaulatan datanya. Kedaulatan data disini berarti memiliki kuasa atas datanya dan mampu mengelola datanya. Dari data tercipta siasat budaya munuju Desa Mandiri Budaya. ❑

*) ***Ahmad Mizdad Hudani**, Manajer IT Pengelola Sistem Informasi Desa Panggungharjo, Staf IT Yayasan Sanggar Inovasi Desa*

Pojok KR

DIY dibanjiri wisatawan, tak kendur terapkan protokol kesehatan.
-- Tak boleh ditawar, petugas harus tegas.

***

Komisi X DPR RI ingatkan, waspadai klaster pendidikan.
-- Kalau belum siap, jangan paksakan tatap muka.

***

Pemda optimalkan sektor pertanian dan UMKM.
-- Butuh pemantauan langsung di lapangan.

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono,. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.